

**LAPORAN KINERJA
KPKNL BALIKPAPAN
2024**



PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja KPKNL Balikpapan sepanjang tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholder* dan masyarakat pengguna layanan. LAKIN tahun 2024 ini merupakan capaian kinerja tahun keempat dalam periode Rencana Strategis KPKNL Balikpapan tahun 2020-2024. LAKIN 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor 4705/KN.1/2024 tanggal 15 Desember 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), rata-rata tingkat pencapaian sebesar 114,73%. Dari capaian tersebut seluruh IKU dominan berwarna hijau. KPKNL Balikpapan berkomitmen untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan kerja tahun anggaran 2025 sehingga capaian kinerja akan terus meningkat.

Kami harapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Balikpapan. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta sebagai bahan evaluasi bagi KPKNL Balikpapan untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Kepada semua pegawai yang telah menyumbangkan karsa dan karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPKNL Balikpapan kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua serta pihak-pihak yang telah membantu penyusunan LAKIN ini.

Balikpapan, 25 Januari 2025
Kepala Kantor,



Adi Suharna
NIP 19720716 199403 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
B. Peran Strategis Organisasi	5
C. Isu Strategis Organisasi	6
D. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Kinerja Lainnya	22
C. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	25
Lampiran	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan (KPKNL Balikpapan) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang kepada *stakeholders*.

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan dalam mengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang disampaikan melalui Laporan Kinerja (LAKIN) KPKNL Balikpapan tahun 2025.

Dengan berpedoman pada nilai-nilai Kementerian Keuangan segenap jajaran KPKNL Balikpapan selalu siap mewujudkan Visi DJKN yaitu: **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

1. Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Mengamankan Kekayaan Negara Secara Fisik, Administrasi, dan Hukum
3. Meningkatkan Tata Kelola dan Nilai Tambah Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Menghasilkan Nilai Kekayaan Negara yang Wajar dan Dapat Dijadikan Acuan dalam Berbagai Keperluan
5. Mewujudkan Lelang Yang Efisien, Transparan, Akuntabel, Adil, dan Kompetitif Sebagai Instrumen Jual Beli yang Mampu Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Seiring dengan perjalanan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, serta untuk mencapai tujuan yang akan diraih, maka dirumuskan sasaran strategis dengan menggunakan pendekatan *Balance Scorecard*

(BSC) yang dituangkan dalam peta strategis. Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan penilaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk mencapai sasaran strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi KPKNL Balikpapan tahun 2024.

B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan pengukuran dengan menggunakan pendekatan BSC, rata-rata tingkat pencapaian terhadap 11 (sebelas) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) IKU KemenkeuThree tahun 2024 sebesar 114,73% dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	112.19%	112.19%
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	127.54%	120.00%
	Indeks Integritas	89.17	92	103.67%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan	71.50%	88.42%	120.00%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.50%	96.41%	111.46%
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100.00%	86.67%	86.67%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100.00%	122.11%	120.00%

Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	113.09	120.00%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100.00%	105.50%	105.50%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100.00%	113.37%	113.37%
Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	48.00%	31.82%	120.00%
	Persentase Produktivitas Lelang	89.00%	116.89%	120.00%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16.00%	0.00%	120.00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	113.50%	120.00%
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98.50	115.88%
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	120.00	120.00%
	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10.00%	0.00%	120.00%
Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	111.74	120.00%
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	93.58	114.12%
	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120%	120.00%

C. PERMASALAHAN DAN LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 KPKNL Balikpapan menghadapi berbagai kendala diantaranya sebagai berikut.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Penilai:

- ketersediaan obyek pembanding yang terbatas;
- nilai taksiran yang diajukan oleh pemohon melampaui nilai wajar yang seharusnya;
- keterbatasan jumlah Fungsional Penilai pada KPKNL Balikpapan yang tidak sebanding dengan beban kerja yang dilimpahkan. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan penilaian tidak sesuai aturan yang berlaku;
- usulan nilai yang diajukan oleh Satuan Kerja pada permohonan penilaian dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan tidak mempunyai dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- SOP penyelesaian layanan penilaian yang efektif dan efisien pada beberapa permohonan penilaian kurang optimal. Hal ini disebabkan faktor kesiapan pemohon penilaian dalam pendampingan survei lapangan sehingga survei lapangan tidak dapat segera dilaksanakan setelah dokumen permohonan penilaian diterima KPKNL Balikpapan.

Saran/langkah antisipatif:

- mencari obyek pembanding dari luar wilayah kerja yang dianggap sebanding dan relevan dengan obyek yang sedang dinilai;
- pemberian edukasi terkait perhitungan nilai taksiran yang benar (metode penelitian taksiran);
- pembentukan Tim Penilai yang terdiri dari Fungsional Penilai dan pegawai dari seksi lain. Penilai Pemerintah melaksanakan edukasi terkait permohonan penilaian dan membuat daftar kelengkapan dokumen permohonan penilaian sesuai peraturan yang berlaku (PMK Nomor 173/PMK.06/2020 Tentang Penilaian Oleh Penilai Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara);
- dalam rangka optimalisasi ketergunaan nilai/daya serap pasar dan mengantisipasi usulan nilai tidak sesuai dengan kondisi pasar maka Penilai Pemerintah mengadakan kegiatan edukasi terkait metode penilaian secara singkat dan ringkas sehingga Satuan Kerja mempunyai dasar kertas kerja saat mengajukan usulan nilai dalam rangka pemindahtanganan atau pemanfaatan;
- melaksanakan konsultasi dan koordinasi pra permohonan penilaian dengan satuan kerja untuk memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan penilaian serta kesepakatan kesiapan jadwal survei lapangan.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara:

- realisasi nominal PNBPN yang berasal dari pemanfaatan berupa sewa relatif kecil apabila dibandingkan dengan target;

- beberapa satuan kerja belum menindaklanjuti PNBP atas pengelolaan BMN di wilayah kerjanya;
- penurunan potensi calon penyewa karena dampak pandemi COVID-19;
- adanya kepentingan internal dari pihak satuan kerja yang seringkali menjadi hambatan bagi KPKNL Balikpapan dalam memproses tindak lanjut permohonan.

Saran/langkah antisipatif:

- koordinasi intensif dengan satuan kerja baik melalui komunikasi via media elektronik maupun peninjauan lapangan untuk menggali potensi BMN yang dapat diajukan pemanfaatannya;
- menghimbau satuan kerja untuk dapat memperluas publikasi terkait adanya penyewaan BMN kepada masyarakat untuk menarik calon penyewa;
- menegaskan kembali kepada satuan kerja terkait prosedur layanan di KPKNL Balikpapan sebagai bentuk respon terhadap potensi konflik kepentingan satuan kerja yang bertentangan dengan peraturan dan SOP terkait pengelolaan BMN yang berlaku di KPKNL Balikpapan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang:

- daya beli masyarakat terhadap lelang menurun karena pengaruh Covid-19;
- agunan lelang yang tidak *marketable*;
- agunan masih dihuni oleh debitur/keluarganya/pihak ketiga;
- maraknya gugatan terhadap lelang eksekusi yang diselenggarakan oleh KPKNL Balikpapan sehingga membuat menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa lelang eksekusi kurang aman dan terpercaya sehingga menyebabkan berkurangnya minat masyarakat terhadap lelang.
- adanya debitur yang melakukan pemblokiran setelah atau sebelum pelaksanaan lelang, sehingga pasca pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan dengan segera balik nama oleh pembeli lelang.
- adanya potensi gugatan dari pembeli lelang karena setelah melakukan pelunasan, pajak dan bea lelang proses balik nama tertunda karena adanya gugatan dari penanggung hutang.

Saran/langkah antisipatif:

- menggencarkan pemasaran lelang melalui katalog lelang maupun situs info lelang pemohon;
- membangun komunikasi dan pemahaman lelang yang baik dengan masyarakat umum;
- membangun koordinasi yang baik dengan BPN/PN dan mitra kerja KPKNL Balikpapan terkait lelang;

- melakukan mitigasi resiko terkait lelang eksekusi melalui peningkatan kualitas pemeriksaan berkas dan berkoordinasi dengan pihak Bank mengenai kondisi objek lelang; Melakukan pengurusan SKPT pada saat beberapa sebelum pelaksanaan lelang untuk mengetahui adanya gugatan dari pihak kedua /debitur atau pihak ketiga.
- memberikan informasi tentang kondisi obyek lelang secara lebih lengkap kepada calon pembeli lelang.

d. Seksi Pengurusan Piutang Negara:

- penanggung hutang/penjamin hutang merupakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang anggotanya sudah tidak diketahui keberadaannya dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar hutangnya;
- penanggung hutang/ahli waris tidak mengakui hutang karena merasa telah melakukan pembayaran kepada bank asal yang menjadi Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), yang diurus oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKN (sebelumnya Dit. PKNSI);
- hutang tidak didukung dengan Barang Jaminan;
- penanggung Hutang ada yang Berada di Luar Wilayah Kerja KPKNL Balikpapan, sehingga sulit untuk melakukan penagihan atau memastikan keadaan dan usaha Debitur saat ini;
- penyerah Piutang sudah tidak ada/tidak diketemukan lagi dan bukti-bukti pendukung sisa hutang sangat minim.

Saran/langkah antisipatif:

- melakukan koordinasi dengan anggota PUPN unsur kejaksaan dan kepolisian;
- melakukan koordinasi dengan penyerah piutang dalam hal ini Dit. PKN;
- pemeriksaan Usaha dan Harta Kekayaan Debitur;
- melakukan Kerja sama dengan penyerah Piutang untuk menelusuri keberadaan debitur.

BAB I | Pendahuluan



Suara burung Enggang yang menggelegar sebagai pertanda baik akan datangnya berkah. Seperti halnya Kemenkeu yang senantiasa memberikan harapan baik dan positif bagi perekonomian Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KPKNL BALIKPAPAN

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Balikpapan merupakan salah satu kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara, yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang pengelolaan negara, penilaian, piutang negara dan pelayanan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL menyelenggarakan fungsi.

- a. Inventarisasi, administrasi, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara.
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
- c. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang.
- d. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara.
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian.
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang.
- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
- h. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan.
- i. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain.
- j. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang.
- k. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan.
- l. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang.
- m. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- n. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan, KPKNL Balikpapan didukung oleh sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut.

a. Berdasarkan Jabatan

Jumlah Pegawai	Es I	Es II	Es III	Es IV	Pelaksana	Jabfung Pelelang	Jabfung Penilai	Jabfung Pranata APBN
33	-	-	1	4	19	5	3	1

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Jumlah Pegawai	S2	S1/D IV	D III	D I	SMA
33	6	17	4	2	4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor dengan didukung oleh 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing bidang. Adapun struktur organisasi KPKNL terdiri dari:

a. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

c. Seksi Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

d. Seksi Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi

dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

e. Seksi Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Terdapat tiga jabatan fungsional di KPKNL Balikpapan, yaitu Pelelang, Penilai Pemerintah, dan Pranata Keuangan APBN. Jabatan Fungsional Pelelang adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela. Sedangkan Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan keuangan APBN meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

Adapun bagan struktur organisasi KPKNL Balikpapan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



B. PERAN STRATEGIS KPKNL BALIKPAPAN

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL Balikpapan memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Balikpapan memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna kekayaan negara terutama difokuskan pada utilisasi kekayaan negara dan pembinaan serta penatausahaan kekayaan negara. Sebagai aset manager, KPKNL Balikpapan mengemban tugas untuk menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara, penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

KPKNL Balikpapan sebagai kantor operasional di daerah yang melayani langsung satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPKNL Balikpapan dengan memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara antara lain Pengukuran SBSK, Portofolio Aset, Sertifikasi BMN serta persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara.

2. Penilaian Kekayaan Negara

Penilaian terhadap kekayaan negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi. Hasil penilaian kekayaan negara antara lain digunakan untuk penyusunan rencana pemerintah pusat, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN, penerbitan SBSN dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian juga dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and The Best Use*.

3. Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan menjadikan lelang sebagai instrumen jual beli yang dikenal secara umum sebagaimana transaksi pasar pada umumnya. Lelang juga merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai nilai lebih apabila dibandingkan dengan transaksi

jual beli biasa, yaitu transparan, akuntabel, kompetitif, efisien dan lebih menjamin kepastian hukum. Dalam setiap pelaksanaan lelang dibuat Risalah Lelang yang merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak.

4. Pengurusan Piutang Negara

Dalam melaksanakan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil penerimaan negara bukan pajak yang berupa Biaya Administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sesuai dengan *Standard Operating Procedure* yang berlaku.

C. ISU STRATEGIS ORGANISASI

Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari Pengelola Barang (Kementerian Keuangan c.q DJKN) untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel. Salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.

Selain itu, Pembangunan Ibu Kota Negara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan wilayah kerja KPKNL Balikpapan menjadikan Kota Balikpapan dan KPKNL Balikpapan khususnya sebagai titik awal dalam proses pengawalan Pembangunan IKN sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih dalam hal penyediaan informasi BMN dan hal hal lainnya yang dibutuhkan dalam ranah tugas dan fungsi DJKN selaku Pengelola Kekayaan Negara.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan ini, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

BAB II Perencanaan Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV Penutup

Lampiran

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan selama tahun 2024, KPKNL Balikpapan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam BAB II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Balikpapan Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja KPKNL Balikpapan di tahun yang akan datang.

BAB II | Perencanaan Kinerja



Kepakan sayap Enggang yang tebal melambangkan perlindungan. Selain itu, daya jelajah burung Enggang cukup luas, yaitu mencapai 100 km². Kemampuan ini sangat menguntungkan bagi regenerasi hutan karena buah serta biji yang dimakan dapat tersebar pada luasan tersebut. Seperti halnya APBN yang dikeluarkan oleh Kemenkeu dapat tersalurkan sepenuhnya untuk masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menjadi alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. visi DJKN, yaitu:

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, Serta untuk Sebesar-Besar Kemakmuran Rakyat”

Untuk merealisasikan visi tersebut, DJKN menetapkan misi sebagai berikut.

- 1. Mengoptimalkan Pengelolaan Kekayaan Negara**
- 2. Mengamankan Kekayaan Negara Secara Fisik, Administrasi, dan Hukum**
- 3. Meningkatkan Tata Kelola dan Nilai Tambah Pengelolaan Kekayaan Negara**
- 4. Menghasilkan Nilai Kekayaan Negara yang Wajar dan Dapat Dijadikan Acuan dalam Berbagai Keperluan**
- 5. Mewujudkan Lelang Yang Efisien, Transparan, Akuntabel, Adil, dan Kompetitif Sebagai Instrumen Jual Beli yang Mampu Mengakomodasi Kepentingan Masyarakat.**

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien; dan
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN menentukan sasaran yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel, Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif;
11. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Kesebelas sasaran yang hendak dicapai tersebut dapat tergambar dalam peta strategis KPKNL Balikpapan tahun 2024 sebagai berikut:

<i>Perspective</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Unggulan
<i>Stakeholder Perspective</i> 30%	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan
		Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang
		Indeks Integritas

<i>Customer Perspective</i> (20%)	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN
	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara
	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian
<i>Internal Process</i> (25%)	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)
	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara
		Persentase Produktivitas Lelang
	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian
<i>Learning & Growth Perspective</i> (25%)	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN
	Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)
	Pengawasan dan Pendendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

- a. Program peningkatan terselenggaranya tertib pengelolaan dan administrasi kekayaan negara;
- b. Program peningkatan tersajinya informasi jumlah dan nilai wajar kekayaan negara;
- c. Program peningkatan kualitas pelayanan pengurusan piutang negara dan pengelolaan barang jaminan;
- d. Program peningkatan kualitas pelayanan lelang;
- e. Program peningkatan kualitas penyajian informasi dan penatausahaan hasil pengurusan piutang negara dan lelang serta pengoptimalan penanganan perkara.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai implementasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) KPKNL Balikpapan telah membuat penetapan kinerja awal tahun 2024 yang terdiri dari 11 (sebelas) sasaran strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian Kinerja Nomor PK-1/WKN.13/2024 tanggal 30 Januari 2024 sesuai rincian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Unggulan	Target 2024
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
	Indeks Integritas	89.17
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan	71.50%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.50%
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
Layanan Penilaian yang <i>Agile</i> , Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75

Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	48%
	Persentase Produktivitas Lelang	89%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100
	Persentase Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	10%
Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
Pengawasan dan Pendendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

BAB III | Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan



Dengan hinggapnya burung Enggang di pohon Batang Garing yang merupakan simbol dari Pohon Kehidupan oleh masyarakat Dayak, burung Enggang dapat mengawasi gerak gerik mangsa dan buah-buahan yang sudah masak, layaknya Kemenkeu yang selalu mengawasi dan waspada terhadap segala kemungkinan di perekonomian Indonesia.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja KPKNL Balikpapan tahun 2024 dilakukan melalui evaluasi dan pengukuran pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada tahun 2024 KPKNL Balikpapan telah menetapkan 11 sasaran strategis :

1. Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa;
3. Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi;
4. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal;
5. Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional;
6. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif;
7. Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif;
8. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Kerja Kemenkeu Satu dalam Ekosistem Kolaboratif;
9. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal;
10. Penguatan Pengawasan Pengendalian Internal yang Efektif;
11. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis tersebut, pada tahun 2024 KPKNL Balikpapan menetapkan 20 (dua puluh) IKU. Berdasarkan hasil pengukuran, rata-rata tingkat pencapaian sasaran pada tahun 2024 sebesar 114,73% dengan rincian pencapaian IKU *Kemenkeu Three* sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2024	Realisasi 2024	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	112.19%	112.19%
	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	127.54%	120.00%

Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	Indeks Integritas	89.17	92	103.67%
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan	71.50%	88.42%	120.00%
	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.50%	96.41%	111.46%
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100.00%	86.67%	86.67%
	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100.00%	122.11%	120.00%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	113.09	120.00%
Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipkatkan	100.00%	105.50%	105.50%
	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100.00%	113.37%	113.37%
Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	48.00%	31.82%	120.00%
	Persentase Produktivitas Lelang	89.00%	116.89%	120.00%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16.00%	0.00%	120.00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	113.50%	120.00%
	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	98.50	115.88%
Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	Indeks Kinerja Anggaran	100	120.00	120.00%
	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10.00%	0.00%	120.00%

Komunikasi Publik yang Efektif	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	111.74	120.00%
Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	93.58	114.12%
	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	120%	120.00%

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelalgn yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1a-CP Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	112.19%	112.19%	
Capaian	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	112.19%	112.19%	
Nilai Kinerja	27.78%	83.33%	83.33%	100%	100%	112.19%	112.19%	
K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelalgn yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	105.15%	86.09%	86.09%	112.58%	112.58%	127.54%	127.54%	
Capaian	105.15%	86.09%	86.09%	112.58%	112.58%	127.54%	127.54%	
Nilai Kinerja	105.15%	86.09%	86.09%	112.58%	112.58%	120.00%	120.00%	
K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelalgn yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
	1c-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10	20	20	30	30	89.17	89.17	Max/TLK
Realisasi	10	20	20	42	42	92.44	92.44	
Capaian	100%	100%	100%	140.00%	140.00%	103.67%	103.67%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120.00%	120.00%	103.67%	103.67%	

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Kebutuhan							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	-	50%	50%	60%	60%	71.50%	71.50%	Max/TLK
Realisasi	-	99.73%	99.73%	99.31%	99.31%	88.42%	88.42%	
Capaian	-	199.46%	199.46%	165.52%	165.52%	123.66%	123.66%	
Nilai Kineria	-	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	-	45%	45%	60%	60%	86.50%	86.50%	Max/TLK
Realisasi	-	69.23%	69.23%	84.62%	84.62%	96.41%	96.41%	
Capaian	-	153.84%	153.84%	141.03%	141.03%	111.46%	111.46%	
Nilai Kinerja	-	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	111.46%	111.46%	

K-Three	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
	3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	96.59%	75.07%	75.07%	68.97%	68.97%	86.67%	86.67%	
Capaian	96.59%	75.07%	75.07%	68.97%	68.97%	86.67%	86.67%	
Nilai Kinerja	96.59%	75.07%	75.07%	68.97%	68.97%	86.67%	86.67%	

K-Three	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
	3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	183.45%	470.33%	470.33%	101.65%	101.65%	122.11%	122.11%	
Capaian	183.45%	470.33%	470.33%	101.65%	101.65%	122.11%	122.11%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	101.65%	101.65%	120.00%	120.00%	

K-Three	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	75	75	75	75	75	75	75	Max/AVG
Realisasi	114.82	104.18	109.50	115.66	111.55	117.72	113.09	
Capaian	153.09%	138.91%	146.00%	154.21%	148.73%	156.96%	150.79%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	48.62%	48.62%	64.22%	64.22%	105.50%	105.50%	
Capaian	-	121.55%	121.55%	107.03%	107.03%	105.50%	105.50%	
Nilai Kinerja	-	120.00%	120.00%	107.03%	107.03%	105.50%	105.50%	
K-Three	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang Efektif							
	5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	18.53%	55.16%	55.16%	84.95%	84.95%	113.37%	113.37%	
Capaian	185.30%	172.38%	172.38%	106.19%	106.19%	113.37%	113.37%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	106.19%	106.19%	113.37%	113.37%	

K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	95%	91%	91%	82%	82%	48%	48%	Max/TLK
Realisasi	100%	88.64%	88.64%	47.73%	47.73%	31.82%	31.82%	
Capaian	94.74%	102.59%	102.59%	141.79%	141.79%	133.71%	133.71%	
Nilai Kinerja	94.74%	102.59%	102.59%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
K-Three	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
	6b-CP Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%	Max/TLK
Realisasi	58.11%	73.67%	73.67%	93.29%	93.29%	116.89%	116.89%	
Capaian	193.70%	163.71%	163.71%	155.48%	155.48%	131.34%	131.34%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8a- N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	45%	60%	60%	80%	80%	90%	90%	Max/TLK
Realisasi	68.09%	99%	99%	116.78%	116.78%	113.50%	113.50%	
Capaian	151.31%	165.00%	165.00%	145.98%	145.98%	126.11%	126.11%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
	8b- N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	85	85	85	85	85	85	85	Max/TLK
Realisasi	100	100	100	99.40	99.40	98.50	98.50	
Capaian	117.65%	117.65%	117.65%	116.94%	116.94%	115.88%	115.88%	
Nilai Kinerja	117.65%	117.65%	117.65%	116.94%	116.94%	115.88%	115.88%	

K-Three	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9a-CP Indeks Kinerja Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100	100	100	100	100	100	100	Max/TLK
Realisasi	105.15	104.42	104.42	97.40	97.40	120	120	
Capaian	105.15%	104.42%	104.42%	97.40%	97.40%	120%	120%	
Nilai Kinerja	105.15%	104.42%	104.42%	97.40%	97.40%	120%	120%	

K-Three	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
	9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Max/TLK
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Capaian	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Komunikasi Publik yang Efektif							
	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	96.96	110	103.48	120	108.99	120	120	
Capaian	121.20%	137.50%	129.35%	150.00%	136.24%	150.00%	150.00%	
Nilai Kinerja	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

K-Three	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11a-N Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	5	15	15	20	20	82	82	Max/TLK
Realisasi	-	15	15	20	20	94	94	
Capaian	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	114.63%	114.63%	
Nilai Kinerja	-	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	114.63%	114.63%	
K-Three	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
	11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	SI	Q3	s.d Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Capaian	-	100%	100%	100%	100%	120%	120%	
Nilai Kinerja	-	100%	100%	100%	100%	120%	120%	

B. KINERJA LAINNYA

Penanganan Perkara

Jumlah perkara/gugatan perdata status aktif di pengadilan yang ditangani oleh KPKNL selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Posisi perkara berdasarkan tingkat peradilan:

Tingkat 1 PN	16
Tingkat 2 Banding	5
Tingkat 3 Kasasi	7

- Posisi perkara berdasarkan jenis peradilan:

Perdata	28
Agama	0
Niaga	0

- Posisi perkara berdasarkan TGR/Non-TGR:

TGR	7
Non-TGR	21

C. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan Surat Pengesahan DIPA-015.09.2.537962/2024 tanggal 24 November 2023, Pada awal tahun 2024, KPKNL Balikpapan menerima anggaran DIPA sebesar Rp6.311.438.000,00. Jumlah keseluruhan anggaran tersebut merupakan jenis belanja barang dan belanja modal. Selama periode berjalan KPKNL Balikpapan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah revisi terakhir pagu KPKNL Balikpapan menjadi sebesar Rp7.043.543.000,00.

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase
5.1	Belanja Pegawai	-	-	-
5.2	Belanja Barang	Rp1.904.370.000,00	Rp1.665.493.372,00	87.46%
5.3	Belanja Modal	Rp5.139.173.000,00	Rp5.091.676.265,00	99.08%
Total		Rp7.046.543.000,00,-	Rp6.757.169.637,00	95.93%

**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
KPKNL BALIKPAPAN TA 2024**

KODE DAN NAMA KEGIATAN/OUTPUT		PAGU (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
		7.043.543.000,00	6.757.169.637,00	95.93
4700	Legislasi dan Litigasi	36.150.000,00	35.620.569,00	98.54
4700	Layanan Dukungan Manajemen Internal	36.150.000,00	35.620.569,00	98.54
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6.329.868.000,00	6.175.390.281,00	97.56
4701	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	49.247.000,00	48.372.200,00	98.22
4701	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.190.695.000,00	1.083.714.016,00	91.02
4701	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	5.089.926.000,00	5.043.304.065,00	99.08
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	10.972.000,00	8.730.000,00	79.57
4702	Komunikasi Publik	10.972.000,00	8.730.000,00	79.57
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	18.368.000,00	12.677.200,00	69.02
4704	Layanan Manajemen Kinerja Internal	18.368.000,00	12.677.200,00	69.02
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standarisasi	13.154.000,00	10.417.478,00	79.20
4796	Sosialisasi dan Diseminasi	13.154.000,00	10.417.478,00	79.20
4798	Pengelolaan Aset	635.031.000,00	514.334.109,00	80.99
4798	Peraturan Lainnya	103.042.000,00	94.145.792,00	91.37
4798	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	289.232.000,00	226.772.828,00	78.41
4798	Pelayanan Publik kepada UMKM	45.008.000,00	33.339.185,00	74.07
4798	Pelayanan Publik Lainnya	39.571.000,00	36.236.535,00	91.57
4798	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	113.706.000,00	87.155.109,00	76.65
4798	Pengelolaan Aser BUN	33.472.000,00	26.577.660,00	79.40
4798	Pengelolaan Aser BUN	11.000.000,00	10.107.000,00	91.88

BAB IV PENUTUP

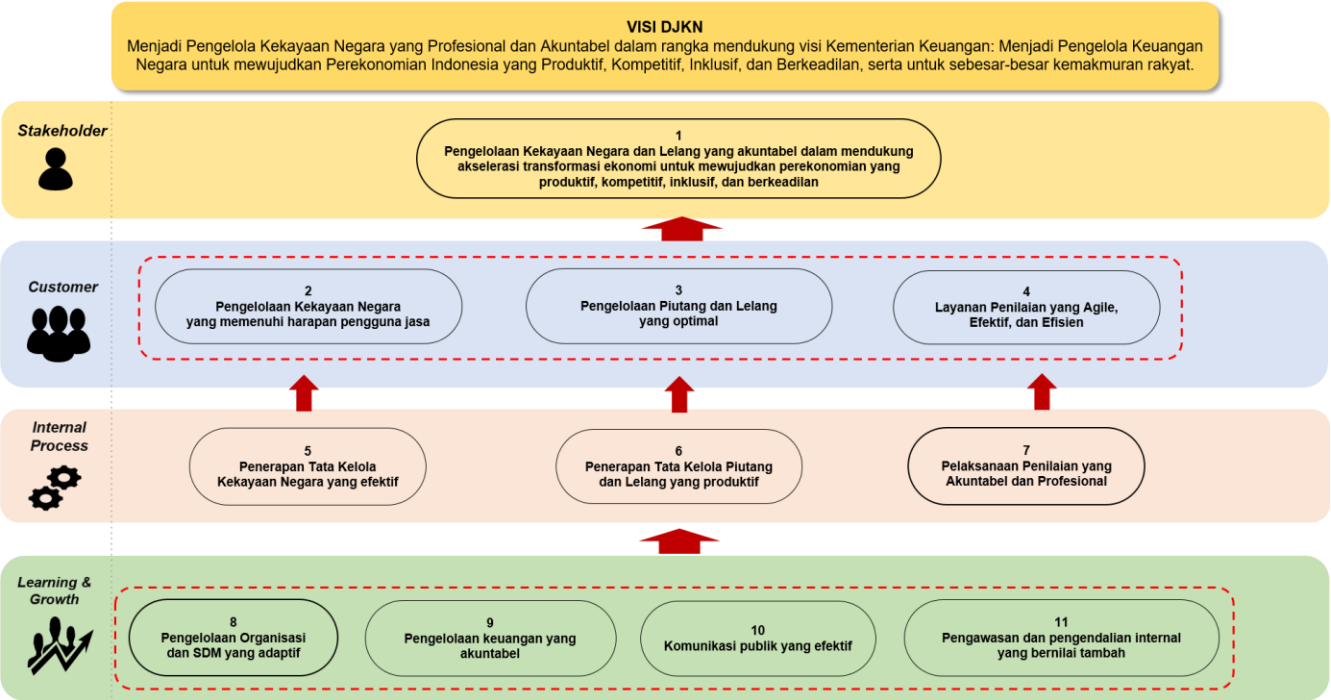
Laporan Kinerja KPKNL Balikpapan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi KPKNL Balikpapan sebagai instansi vertikal DJKN di daerah serta upaya peningkatan good governance yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu *tools* dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Balikpapan dalam menghadapi berbagai tantangan kinerja dan dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi KPKNL Balikpapan, sehingga dapat memberikan *feedback* guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga capaian KPKNL Balikpapan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan memberikan pelayanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-1/WKN.13/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024



Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan	1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp 15,15 M)
		1c-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100% (Rp 367 M)
		3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% (Rp 1,53 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	66% (29 BKPN)
		6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif	8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel	9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif	10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah	11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82
		11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran	
Program:			
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko		Rp	637.185.000
Kegiatan:			
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	13.154.000
2.	Pengelolaan Aset	Rp	624.031.000
Program:			
Program Dukungan Manajemen		Rp	5.674.253.000
Kegiatan:			
1.	Legislasi dan Litigasi	Rp	36.150.000
2.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	5.608.763.000
3.	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	Rp	10.972.000
4.	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	18.368.000
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara		Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan	
			
Ditandatangani Secara Elektronik		Ditandatangani Secara Elektronik	
Jose Arif Lukito		Adi Suharna	

**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan							
1a-CP	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1c-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipkatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95%	91%	91%	82%	82%	66%	66%
6b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel							
9a-CP	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi Publik yang Efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							

11a-N	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
Kode		Target						
SS/IKU	SS dan IKU	Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
11b-N	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI- WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Balikpapan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suharna

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BALIKPAPAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode	Penanggung	Biaya (Rp)	
				Kegiatan	Output	Pelaksanaan	Jawab		
1.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kegiatan Penggalian Potensi Peningkatan Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Pelaksanaan kegiatan penggalian potensi	Q1: Penggalian peningkatan negara	potensi penerimaan	Q1: Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggalian potensi	Q1 s.d. Q4	Seksi dan pejabat fungsional terkait	-
				Q2: Penggalian peningkatan negara	potensi penerimaan	Q2: Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggalian potensi			
				Q3: Penggalian peningkatan negara	potensi penerimaan	Q3: Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggalian potensi			
				Q4: Penggalian peningkatan negara	potensi penerimaan	Q4: Laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penggalian potensi			

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan



Ditandatangani Secara Elektronik
Adi Suharna

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA
KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Adi Suharna		NAMA	Jose Arif Lukito	
NIP	197207161994031003		NIP	197109121996031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negar dan Lelang Balikpapan		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Balikpapan		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara	
NO	RENCANA HASIL KERJA		INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
A. UTAMA					
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)		Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	100%	Penerima Layanan
			Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
			Indeks Integritas	89,17	Penerima Layanan

2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima Layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	Penerima Layanan
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
		Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima Layanan
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	66%	Proses Bisnis
		Persentase Produktivitas Lelang	89%	Proses Bisnis

7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses Bisnis
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	90%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Penguatan Internal atau Anggaran
9	Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	Penguatan Internal atau Anggaran
10	Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara)	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	82	Penguatan Internal atau Anggaran
		Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN		
PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.

4	Harmonis	
PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

7	Kolaboratif	
PERILAKU KERJA		
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna
197207161994031003



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito
197109121996031001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	36 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Tingkat Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
	2	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17	89,17
	4	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
	5	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45%	45%	-	45%	86,5%	86,5%
	6	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
9	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
10	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
11	Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara	95%	91%	91%	82%	82%	66%	66%
12	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
13	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	10%	60%	60%	75%	75%	90%	90%
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85
16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI)	-	-	-	-	-	82	82
20	Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%

KONSEKUENSI	
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>

30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Adi Suharna

197207161994031003



Ditandatangani secara elektronik

Jose Arif Lukito

197109121996031001



[illegible]

